



ABSTRACT

Border regions are geographically presented with potential economic benefits. However, some of these areas have not been able to take advantage of their strategic geographic locations. This has also been the case for border areas in Indonesia, where 23 out of 43 border regions are categorized as underdeveloped and poor. There is a spectrum of perceptions by stakeholders on how border regions should be developed in the context of an international border. This study sought to capture the perspectives of Indonesian stakeholders on border region development, and to what extent does these perspectives affect the policy of border areas development with a case study in West Southeast Maluku. The research was conducted using qualitative method with in-depth interview as a primary collecting data technique. The results show that despite some perceptions of stakeholders who view West Southeast Maluku as an area of insecurity, they also see the opportunity for to be developed as a gateway, area of opportunity, zone of contacts and zone of cooperation. However, such perspectives have not entirely represented by corresponding strategy and policy on the development of border areas due to unsynchronized perceptions and sectoral ego among stakeholders on various levels. Therefore, to produce proper development policy and strategy of border areas, stakeholders should align their perspectives through a more comprehensive coordination.

Keywords: border impacts, border region development policy, political borders.



INTISARI

Lokasi geografis suatu kawasan yang terletak di perbatasan antar negara memberikan peluang secara ekonomi bagi kawasan tersebut. Akan tetapi, melihat kondisi daerah perbatasan di Indonesia, ternyata tidak semua daerah perbatasan dapat diuntungkan oleh kondisi geografisnya. Dari 43 daerah perbatasan Indonesia, 23 diantaranya merupakan daerah tertinggal dan miskin. Terdapat perbedaan cara pandang para pemangku kepentingan tentang bagaimana seharusnya membangun daerah-daerah perbatasan. Studi ini bertujuan untuk mengetahui perspektif pemangku kepentingan di Indonesia tentang pembangunan di kawasan perbatasan, dan sejauh mana perspektif tersebut mempengaruhi kebijakan pembangunan kawasan perbatasan, dengan studi kasus di Maluku Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam sebagai teknik utama pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pemangku kepentingan memandang Maluku Tenggara Barat selain sebagai area rawan, juga melihat adanya potensi untuk mengembangkan daerah ini sebagai pintu gerbang, area yang memiliki peluang, zona kontak dan juga zona kerjasama. Namun sampai saat ini kebijakan dan strategi pembangunan kawasan perbatasan tidak sejalan dengan persepsi pemangku kepentingan karena tidak sinkronnya pemahaman atas persepsi dan adanya ego sektoral antar masing-masing pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, untuk menghasilkan kebijakan dan strategi yang baik dalam pembangunan daerah perbatasan, perlu adanya peningkatan koordinasi antar para pemangku kepentingan.

Keywords: dampak perbatasan, kebijakan pembangunan kawasan perbatasan, politik perbatasan.